

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN, 2003, pasal 1, ayat 1). Pernyataan ini menggambarkan bahwa pemerintah menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang.

Pendidikan tidak hanya mempersiapkan individu dalam membentuk kepribadian (character), tetapi pendidikan menyediakan tenaga kerja terampil yang sangat penting untuk mendukung pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan membutuhkan pengeluaran keuangan yang tidak sedikit untuk menunjang proses pendidikan.

Di samping itu, pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Oleh karena itu tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat ekonomi yang pesat (Fattah, 2004: 16).

Walaupun pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan secara intensif selama lebih dari 30 tahun, mutu pendidikan nasional Indonesia umumnya masih rendah. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan ini adalah masalah pendanaan pendidikan (pembeayaan pendidikan). Permasalahan ini sangat kompleks karena melibatkan pemerintah (baik pusat maupun daerah), masyarakat, dan juga keluarga/rumah tangga (Triaswati, dkk: dalam Supriadi, 2004: 62).

Hal senada pernah diungkapkan oleh laporan Bank Dunia yang menyatakan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong relatif rendah. Laporan Bank Dunia yang berjudul *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery* (1998: 121) mengidentifikasi empat kelemahan institusional sebagai penyebab potensial terhambatnya kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya pada tingkat pendidikan dasar, yaitu: (1) sistem organisasi yang kompleks di tingkat pendidikan dasar, (2) manajemen yang terlalu sentralistik pada tingkat SLTP, (3) terpecah belah dan kakunya proses pembiayaan pendidikan pada tingkat SD dan SLTP, dan (4) manajemen yang tidak efektif pada manajemen sekolah.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah, kelemahan-kelemahan tersebut harus dapat diatasi. Bank Dunia dalam laporan tersebut merekomendasikan lima aspek yang diproyeksikan akan mampu mengatasi kelemahan institusional yang dimaksud yaitu dengan: (1) pemberdayaan lokal, (2) penetapan kembali tanggung jawab atas perencanaan jangka panjang, (3) pembangunan kemampuan kelembagaan, (4) pemberian otonomi yang lebih besar dengan manajemen sekolah yang

bertanggung jawab, dan (5) sistem pendanaan yang menjamin pemerataan dan efisiensi.

Lima aspek rekomendasi yang diajukan bank Dunia tersebut mendorong lahir dan diberlakukannya otonomi dan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia yang implementasinya kemudian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah berupa diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community Based Educations*) sejalan dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah daerah dan Provinsi sebagai daerah Otonom.

Dalam konteks desentralisasi pendidikan yang terapananya berupa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) serta untuk mendukung untuk peningkatan mutu, maka penataan sistem biaya dan pembiayaan pendidikan (*School Based Budgeting*) sangat diperlukan. Asumsinya adalah bahwa ada keterkaitan antara pembiayaan pendidikan dengan mutu pendidikan terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Selanjutnya masalah keuangan (pembiayaan) merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah. Hal ini disebabkan keseluruhan komponen pendidikan erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Berbagai fenomena yang tampak bahwa banyak sekolah yang tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan sekolah, baik untuk menggaji guru maupun dalam pengadaan sarana dan

prasarana pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dicari suatu strategi pembiayaan pendidikan yang lebih adil dan dapat meningkatkan mutu.

Berkenaan dengan permasalahan utama itu penelitian ini mencoba untuk: (1) Mengidentifikasi profil pembiayaan pendidikan yang terjadi pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), (2) Berdasarkan profil pembiayaan itu diuji suatu strategi pembiayaan pendidikan yang lebih adil dan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam ekonomi pendidikan, pembiayaan pendidikan dibedakan dengan biaya pendidikan. Biaya pendidikan mengkaji tentang biaya langsung dan tidak langsung. Fokus analisisnya pada aspek marginalnya, rata-rata unit cost, nilai tambah dan efisiensi pengalokasiannya. Pembiayaan pendidikan mengkaji tentang bagaimana biaya itu diperoleh, fokusnya pada siapa yang membiayai pendidikan, siapa yang menikmati, dan bagaimana supaya adil dan merata (Nurhadi, 1993: 7).

Adanya perbedaan yang mencolok antara perolehan atau *output* yang dihasilkan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diperkirakan salah satu penyebab perbedaan itu adalah biaya yang diperoleh sekolah, ada yang sekedar cukup, tetapi ada yang masih jauh dari standar yang dibutuhkan tergantung dukungan masyarakat di mana sekolah itu berada. Analisis kebutuhan biaya dan dari mana saja sumber-sumber biaya dapat diperoleh untuk menyelenggarakan sebuah sekolah menjadi sangat penting.

Selanjutnya Fattah (2004: 90) mengemukakan upaya peningkatan mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama yaitu: (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas

tenaga kependidikan, biaya, dan sarana belajar, (2) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif, dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai. Jadi, kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan dan tenaga profesional kependidikan dapat disediakan di sekolah.

Sejalan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Kenyataan di lapangan dirasakan kurangnya perhatian pemerintah, masyarakat, keluarga dalam membantu pembiayaan pendidikan. Dengan besarnya kebutuhan biaya pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan mutu, maka dapat diperkirakan bahwa alokasi yang dapat disediakan untuk pendidikan dasar dan menengah, khususnya SMK Negeri dan Swasta masih tetap memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara tersedianya dana dengan kebutuhan. Jadi, untuk menggali sumber biaya dari pihak masyarakat dan keluarga mutlak diperlukan.

Kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung kepada sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Bagi sekolah negeri masalah pembiayaan pendidikan sebagian besar mendapat alokasi anggaran dari pemerintah. Namun, bagi sekolah swasta

pembiayaan pendidikan itu sebagian besar berasal dari keluarga (orangtua). Sumber utamanya berasal dari SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang dibebankan kepada orangtua. Oleh karena itu, perlu dicari strategi untuk mengatasi masalah-masalah pembiayaan tersebut.

Di SMK AL-Washliyah 2 Perdagangan ditemukan masalah pendanaan sebagai berikut:

1. Sumber utama yang diprioritaskan dalam pembiayaan berasal dari orangtua (keluarga) berupa SPP,
2. Pengelolaan keuangan sekolah ditangani langsung oleh bendahara sekolah,
3. Pembiayaan pendidikan belum mampu memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan mutu terutama pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran,
4. Peserta didik sebanyak 30 % langsung mencari lapangan pekerjaan, 15 % melanjutkan ke perguruan tinggi,
5. Sistem penggajian berdasarkan masa kerja,
6. Pengelolaan keuangan sekolah masih bersifat tradisional.

Jika, masalah yang dihadapi SMK AL-Washliyah 2 Perdagangan tidak dapat dicarikan solusinya, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut tidak dapat direalisasikan. Upaya peningkatan mutu yang berhubungan secara langsung dengan pembiayaan seperti peningkatan kesejahteraan guru, penyediaan fasilitas pembelajaran, dan pengembangan SDM melalui pelatihan guru. Jadi, strategi pembiayaan pendidikan merupakan hal yang esensial untuk meningkatkan mutu pendidikan.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMK Alwashliyah 2 Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Pelajaran 2005-2006.

## **C. Masalah Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian sebagaimana diungkapkan di atas, permasalahan penelitian ini rumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di SMK Alwashliyah 2 Perdagangan Kabupaten Simalungun, dalam hal:

1. Peningkatan mutu pembelajaran di SMK Alwashliyah 2 Perdagangan Kabupaten Simalungun?
2. Pengembangan mutu guru SMK Alwashliyah 2 Perdagangan Kabupaten Simalungun?
3. Pembinaan siswa di SMK Alwashliyah 2 Perdagangan Kabupaten Simalungun?
4. Peningkatan sarana dan prasarana di SMK Alwashliyah 2 Perdagangan Kabupaten Simalungun?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

Mendeskripsikan strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di SMK Alwashliyah 2 Perdagangan Kabupaten Simalungun, dalam hal:

1. Pengembangan pelaksanaan sistem pembelajaran di SMK Alwashliyah 2 Perdagangan Kabupaten Simalungun.
2. Pengembangan mutu guru SMK Alwashliyah 2 Perdagangan Kabupaten Simalungun.
3. Pembinaan siswa di SMK Alwashliyah 2 Perdagangan Kabupaten Simalungun.
4. Peningkatan sarana dan prasarana di SMK Alwashliyah 2 Perdagangan Kabupaten Simalungun.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat :

1. Secara teoritis; Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam pengembangan kebijakan pembiayaan pendidikan. Di samping itu, memberikan kontribusi terhadap perkembangan administrasi pendidikan.
2. Secara konseptual; Hasil penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan konsep tentang pembiayaan dalam pendidikan, antara lain :
  - a. Sebagai bahan masukan bagi sekolah terutama yang berkaitan dengan strategi manajemen pembiayaan yang diterapkan dan selanjutnya dapat



melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

- b. Untuk menambah wawasan bagi pembaca dalam hal manajemen, khususnya manajemen penbiayaan pendidikan dan sekolah, dan
- c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

